ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI MIS HASANUDDIN BERDASARKAN TEORI ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Moh. Azaim[1], Toib[2], Uswatun Hasanah[3], Muhammad Amin Fathih[4]

[1,2,3,4]*Universitas Al-Qolam Malang*
E-mail : toibpps25@pasca.alqolam.ac.id[1]. uswatunhasanahpps25@pasca.alqolam.ac.id[2]

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan adalah alat penting untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kesuksesan kebijakan tergantung pada bagaimana lembaga pendidikan menerapkannya. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan pendidikan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan di MIS Hasanuddin. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi program sekolah, wawancara dengan guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan. Model Miles dan Huberman digunakan untuk analisis data, yang mencakup penyajian, penarikan kesimpulan, dan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan telah diterapkan di MIS Hasanuddin dengan cukup efektif. Hal ini terbukti dengan penerapan kurikulum yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan kelompok kerja guru, peningkatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam, dan keterlibatan orang tua dalam membantu siswa. Kepemimpinan kepala madrasah yang aktif, komitmen guru, budaya sekolah yang baik, dan dukungan masyarakat adalah beberapa faktor yang membantu pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, masih ada beberapa hambatan, seperti kekurangan sumber daya pendidikan berbasis teknologi, keterbatasan anggaran, dan evaluasi kebijakan yang belum optimal. Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, implementasi kebijakan di MIS Hasanuddin telah memenuhi elemen komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, elemen komunikasi masih membutuhkan penguatan.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah, Analisis Kebijakan Pendidikan.*

ABSTRACT

Educational policy is an important tool for regulating the implementation of education to achieve national educational goals. The success of a policy depends on how educational institutions implement it. This study uses educational policy analysis theory to analyze the implementation of educational policy at MIS Hasanuddin. The study was conducted using a qualitative approach and case studies. Data collection was carried out through school program documentation, interviews with teachers, madrasah principals, and education personnel. The Miles and Huberman model was used for data analysis, which includes presentation, drawing conclusions, and data reduction. The results of the study indicate that educational policy has been implemented at MIS Hasanuddin quite effectively. This is evidenced by the implementation of a curriculum in accordance with government policy, increasing teacher capacity through training and teacher working groups, improving character education based on Islamic values, and parental involvement in helping students. Active leadership of madrasah principals, teacher commitment, a good school culture, and community support are some of the factors that help policy implementation. However, several obstacles remain, such as a lack of technology-based educational resources, budget constraints, and suboptimal policy evaluation. According to George C. Edward III's policy implementation theory, policy implementation at MIS Hasanuddin has met the elements of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. However, the communication element still needs strengthening.

Keywords : *Policy Implementation, Education Policy, Madrasah Ibtidaiyah, Education Policy Analysis.*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan penjelasan di Bab II Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu pengetahuan, dan berpendidikan tinggi. (Peraturan SISDIKNAS, 2003)

Pendidikan adalah aktivitas yang sangat kompleks. Proses pendidikan melibatkan hampir semua aspek kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan melibatkan aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, kesehatan, psikologi, sosiolog, dan bahkan agama. Bagaimanapun, agar strategi dan kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan Indonesia, penanganan pendidikan harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Pendidikan tidak hanya penting dan penting bagi manusia, tetapi juga merupakan sarana penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam dengan bijak dan memaksimalkan potensi diri. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan nasional, yaitu sistem pendidikan harus menjadi pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia untuk berkembang menjadi orang Indonesia yang berkualitas, yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman. Semua orang yang bekerja dalam dunia pendidikan tentu menginginkan mutu pendidikan. Setidaknya ada dua alasan utama mengapa kualitas pendidikan sangat penting. Pertama, pertimbangan persaingan. Lembaga pendidikan dan dunia kerja bersaing satu sama lain. Saat ini, setiap calon tenaga kerja harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi agar mereka dapat memperoleh posisi yang lebih baik. Kedua, dengan munculnya kebebasan dan otonomi institusi pendidikan, kualitas diperlukan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Upaya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas pasti memiliki tantangan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, pengawas, dan kepala sekolah melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kurikulum nasional dan lokal. Namun, fakta menunjukkan bahwa masih ada perbedaan dalam kualitas pendidikan antara berbagai jenis pendidikan, jenjang, dan lembaga.

Di era 5.0, masyarakat memerlukan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan sosial yang semakin kompleks dan menyeluruh. Oleh karena itu, pendidikan merupakan bagian penting dari upaya perubahan bersama masyarakat. Untuk membagi komunitas pembelajaran dan pendorong pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar dalam platpon teknologi dan informasi serta mengembangkan kurikulum secara global dengan memanfaatkan inovasi digital

Banyak faktor yang menentukan mutu pendidikan, baik secara internal maupun eksternal. Sebagai sebuah organisasi, Davis dan Newstrom (1985: 152) mengatakan bahwa mutu pendidikan ditentukan oleh sumber daya manusia (people), sistem organisasi (structure), sarana dan prasarana (technology), dan lingkungan tempat madrasah itu diselenggarakan (environment). Sebaliknya, input, proses, output, dan hasil yang efektif menentukan kualitas sistem pendidikan. Input pendidikan harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Ini termasuk kondisi lingkungan, sarana prasarana, sumber daya manusia (guru, pengawas, kepala sekolah, dan siswa),

visi, misi, kurikulum, dan metode pembelajaran. Selanjutnya, masukan atau input ini diubah melalui proses belajar mengajar untuk menghasilkan kualitas pendidikan. Sebuah proses dikatakan efektif jika ada iklim yang mendukung input yang mendorong pemberdayaan siswa dan anggota komunitas pendidikan lainnya. Input dan proses pendidikan sangat penting untuk mencapai hasil dan output pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan memerlukan kebijakan yang mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan globalisasi. Kebijakan pendidikan merupakan serangkaian keputusan yang diambil pemerintah maupun lembaga pendidikan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Implementasi kebijakan menjadi tahap penting karena menentukan apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif di tingkat satuan pendidikan.

Sebagai institusi pendidikan Islam, madrasah ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan nasional sambil mempertahankan ciri-ciri keislamannya. Akibatnya, keberhasilan pelaksanaan kebijakan di madrasah sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala madrasah dalam mengelola sumber daya, kesiapan guru untuk melaksanakan pembelajaran, dan dukungan masyarakat terhadap program pendidikan. Salah satu madrasah MIS Hasanuddin terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti penerapan kurikulum nasional, penguatan pendidikan karakter, peningkatan kompetensi guru, dan digitalisasi administrasi sekolah. Namun, ada banyak tantangan yang harus dipertimbangkan saat menerapkan kebijakan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana teori analisis kebijakan pendidikan, khususnya teori implementasi George C. Edward III, dapat menganalisis implementasi kebijakan pendidikan di MIS Hasanuddin.

METODE

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan jenis penelitian **studi kasus (case study)**. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pendidikan di MIS Hasanuddin berdasarkan teori analisis kebijakan pendidikan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara komprehensif proses pelaksanaan kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi, serta berbagai kendala dan upaya yang dilakukan oleh pihak madrasah dalam menjalankan kebijakan pendidikan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di MIS Hasanuddin, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena madrasah tersebut telah menerapkan berbagai kebijakan pendidikan yang mengacu pada kebijakan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, seperti implementasi kurikulum, penguatan pendidikan karakter, peningkatan kompetensi guru, serta pengelolaan administrasi madrasah. Penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan, mulai dari tahap observasi awal hingga proses analisis data.

Metode purposive sampling digunakan untuk memilih subjek penelitian. Informan penelitian termasuk kepala madrasah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, guru yang menerapkan kebijakan dalam proses pembelajaran, tenaga kependidikan yang membantu administrasi pendidikan, ketua komite madrasah yang berfungsi sebagai representasi masyarakat, dan beberapa orang lain.

Untuk mengumpulkan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pembelajaran, pelaksanaan program sekolah, dan penerapan berbagai kebijakan pendidikan di madrasah. Wawancara mendalam dengan kepala madrasah, tenaga kependidikan, komite madrasah, dan guru dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang proses penerapan kebijakan, faktor pendukung, dan faktor penghambatan. Untuk melengkapi data penelitian, dokumen seperti visi dan misi sekolah, struktur organisasi, program kerja, perangkat pembelajaran, laporan supervisi, notulen rapat, dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan dikumpulkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Kebijakan Pendidikan

Kata kebijakan (Hasbullah, 2015: 37) adalah terjemahan dari kata "policy" dalam bahasa Inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, sehingga penekanannya bertuju kepada tindakan (produk). Kata “kebijakan” jika disandingkan dengan "pendidikan" maka merupakan hasil terjemahan dari kata "educational policy" yang berasal dari dua kata, sehingga (Hasbullah, 2015: 40) mengatakan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jika dilihat lagi maka kebijakan pendidikan ini adalah hasil produk dari orang/satuan yang terpilih, produk dari beberapa masukan dari semua pihak demi perbaikan mutu pendidikan. H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho melalui kajian yang mendalam Tilaar dan Nugroho (2008: 140) sebagai pakar di bidang pendidikan menyimpulkan bahwa: "Kebijakan Pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu". Definisi lain tentang Kebijakan Pendidikan dikemukakan oleh Arif Rohman (2012: 86), yaitu: "keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta tertentu dalam menyelenggarakan rencana-rencana pendidikan".

Menurut buku Ali Imron Analisis Kebijakan Pendidikan, kebijakan pendidikan termasuk dalam kebijakan negara. Carter V. Good (1959) memberikan pemahaman tentang kebijakan pendidikan. Didasarkan pada sistem nilai dan beberapa penilaian faktor-faktor situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang bersifat melembaga. Kebijakan publik lainnya, seperti kebijakan ekonomi, politik, internasional, dan keagamaan, sangat terkait dengan kebijakan pendidikan. Akibatnya, kebijakan pendidikan Indonesia tidak dapat berdiri sendiri. Kebijakan tersebut dapat berubah setiap kali kebijakan publik berubah.

Menurut definisi tersebut, kebijakan pendidikan sangat penting untuk keunggulan dan keberadaan bangsa dalam persaingan global. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus menjadi prioritas utama di era globalisasi. Dia mengklaim bahwa demokrasi diuntungkan oleh globalisasi. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik (public policy), atau dengan kata lain kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Kebijakan ini mencakup perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek, serta

strategi untuk mencapai tujuan pendidikan. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

Dasar Dan Tujuan Kebijakan Pendidikan

1. Dasar Kebijakan Pendidikan Dasar kebijakan pendidikan ditinjau dari segi sosiologis adalah selain sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan proses pendidikan tersebut harus sesuai dengan hakikat manusia yang bebas (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 140).
2. Tujuan Kebijakan Pendidikan diperlukan terbentuknya rancangan kebijakan rumusan kebijakan dalam pendidikan, guna terarahnya pandangan-pandangan yang sesuai dengan tujuan kebijakan (Irianto:29-32), yaitu: (1) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat, (2) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi, dan (3) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi.
   a. Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat Secara proses penyempurnaan demi mencapai harkat dan martabat manusia dengan upaya yang terus menerus. Sehingga pendidikan memiliki nilai-nilai yang dalam, oleh karenanya perlu untuk membentuk pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dengan penuh kebhinekaan. Sekalipun pendidikan tidak bebas nilai dan budaya akan tetapi lebih diarahkan pada pembentukan warga negara, oleh karenanya semua komponen bangsa memiliki tanggung jawab.
   b. Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi tidak dapat dipungkiri bahwa sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik berbeda dengan tingkatan perkembangan sosial. Pada tingkat individual, kontribusi pendidikan dapat membantuperkembangan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab.Pada lain hal juga diharapkan agar mengerti dan sadar tentang kewajiban dan tanggung jawab peserta didik terhadap bangsa dan negara sehingga wawasan dan perilakunya semakin demoktratis.
   c. Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi pendidikan adalah Suatu keniscayaan bahwa suatu investasi jangka panjang, adapun alasannya sebagai berikut:Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan adalah fasilitas yang dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan demikehidupan, sebagai bukti umum bahwa pendapatan seseorang tergantung akan tingkat pendidikannya karena lebih produktif.

Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Menurut Rusdiana (2015), ada beberapa karakteristik yang membedakan kebijakan pendidikan dari kebijakan lainnya

a. Memiliki tujuan pendidikan. Menurut Lazwardi (2017), kebijakan pendidikan harus mencantumkan tujuan pendidikan yang tepat, jelas, terarah, dan terarah. Memberikan gambaran tentang apa yang telah dicapai dalam bidang pendidikan.
b. Terpenuhinya aspek legal dan formal. Untuk kebijakan pendidikan menjadi sah dan diterima secara konstitusional, persyaratan tertentu harus dipenuhi sebelum diberlakukan hukum yang relevan (Anwar, 2017).
c. Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan adalah seperangkat pedoman/aturan umum.

   Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus memiliki manfaat operasional yang dapat diterapkan (Solichin, 2015). Untuk mengukur pencapaian tujuan secara akurat, maka konsep operasional ini perlu dimiliki.

d. Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan dibuat dan disusun oleh para ahli yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk membuat kebijakan (Heriawan, 2018). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan masalah terbaru.
e. Memiliki sistematika. Setiap elemen kebijakan pendidikan memiliki prosedur yang diatur. Keberlanjutan, efektifitas, dan efisiensi adalah faktor penting bagi para ahli sistematika. Selain itu, kebijakan harus pragmatis dan tidak diskriminatif dan tidak masuk akal (Rahman, 2020). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang baru dibuat tidak terpengaruh oleh hukum domestik dan internasional.
f. Implementasi kebijakan pendidikan. Karena kebijakan dapat dievaluasi, dipantau, dan dievaluasi selama tahap implementasi di lapangan, tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan dapat dilihat di lapangan. Pada tahap ini, orang dapat menarik kesimpulan dan belajar dari penerapan kebijakan.

Teori Manajemen Pendidikan

1. Teori Sistem.

Teori sistem memandang sekolah sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berhubungan, seperti siswa, guru, kurikulum, fasilitas, dan lingkungan masyarakat. Menurut pandangan ini, keberhasilan sekolah bergantung pada kemampuan setiap elemen untuk bekerja sama dengan baik dan berfungsi secara sinergis. Dengan demikian, penerapan teori sistem di sekolah membutuhkan pendekatan manajemen holistik yang mempertimbangkan semua aspek sekolah. (Sumual dkk., 2024). Teori sistem dalam pendidikan memiliki beberapa manfaat, seperti: meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya; koordinasi elemen meningkatkan kualitas pembelajaran; memungkinkan perencanaan strategis dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan; dan menyediakan mekanisme evaluasi dan umpan balik berkelanjutan.

2. Teori Kontingensi (Contingency Theory)

Teori kontingensi, menurut Satria dkk., dikutip oleh Sumual et al., menyatakan bahwa manajemen harus disesuaikan dengan situasi tertentu daripada menggunakan satu pendekatan manajemen untuk setiap situasi. Teori ini dalam pendidikan berarti manajemen sekolah harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan lingkungan sekolah, baik internal maupun eksternal. Menurut teori kontingensi, tidak ada satu metode manajemen yang cocok untuk setiap situasi. Kesesuaian gaya manajemen dengan situasi atau lingkungan tertentu sangat penting untuk keberhasilan manajemen. Teori ini dalam pendidikan menyatakan bahwa kebijakan dan strategi manajemen harus disesuaikan dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan sumber daya yang tersedia di institusi pendidikan. Misalnya, sekolah dengan sumber daya terbatas harus menggunakan pendekatan manajemen yang inovatif dan adaptif untuk tetap efektif, tidak seperti sekolah dengan fasilitas lengkap dan dukungan kuat. Teori ini membantu manajer pendidikan menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan.

3. Teori Perubahan (Change Theory)

Proses transformasi sistem atau proses pendidikan untuk mencapai tujuan adalah fokus dari teori perubahan. Teori kepemimpinan transformasional, seperti teori perubahan, menekankan betapa pentingnya seorang pemimpin untuk memotivasi dan menginspirasi bawahannya untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Gaya kepemimpinan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek; itu juga mengutamakan inovasi dan pengembangan individu dalam proses pendidikan. Kepala sekolah sering kali bertindak sebagai pemimpin transformasional di sekolah kalangan atas. Mereka mendorong karyawan untuk terus berinovasi, memperbaiki kurikulum, dan membuat pengalaman belajar yang lebih bermakna. Metode ini membantu sekolah

mempertahankan daya saing dan mempertahankan reputasi mereka sebagai penyedia pendidikan berkualitas tinggi. (Sumual et al. 2024). Teori perubahan digunakan dalam dunia pendidikan untuk mengatur pengembangan profesional guru, penerapan teknologi baru, dan reformasi kurikulum. Teori ini memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat diterima dan berdampak positif pada kualitas pendidikan.

Ketiga teori manajemen pendidikan ini saling melengkapi dan dapat diterapkan di mana saja dan bagaimana pun lembaga pendidikan membutuhkannya. Teori Sistem memberi kita kerangka kerja yang luas untuk memahami bagaimana elemen-elemen dalam pendidikan berinteraksi. Teori Kontingensi menekankan betapa pentingnya strategi manajemen menyesuaikannya dengan kondisi tertentu. Teori Perubahan mendukung proses inovasi dan adaptasi saat kita menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Sangat penting untuk memahami dan menerapkan teori-teori ini saat menganalisis dan membangun kebijakan pendidikan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan siswa. Ketiga teori manajemen pendidikan ini saling melengkapi dan dapat diterapkan dalam konteks apa pun yang terkait dengan institusi pendidikan.

Pembahasan

Hasil observasi, wawancara, dan penelitian dokumentasi di MIS Hasanuddin menunjukkan bahwa berbagai program yang mengacu pada kebijakan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan telah digunakan untuk menerapkan kebijakan pendidikan. Program-program ini mencakup penerapan kurikulum, penguatan pendidikan karakter, peningkatan kompetensi pendidik, dan pengelolaan madrasah. Secara keseluruhan, seluruh komponen sekolah berusaha menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, untuk menjalankan kebijakan dengan lebih baik, masih ada beberapa masalah yang perlu ditangani.

Di MIS Hasanuddin, kebijakan pendidikan disosialisasikan pertama kali kepada guru dan staf melalui rapat koordinasi pada awal tahun ajaran, rapat evaluasi bulanan, dan forum Kelompok Kerja Guru (KKG). Sebagai hasil dari wawancara dengan kepala sekolah, setiap perubahan kebijakan pemerintah yang terkait dengan administrasi pembelajaran, kurikulum, dan asesmen harus disampaikan secara langsung kepada semua guru. Ini memastikan bahwa semua guru memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan prosedur untuk menerapkannya. Informasi diberikan secara cepat kepada seluruh pendidik melalui grup komunikasi digital selain rapat formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ditingkatkan melalui komunikasi yang efektif. Guru dapat memahami perubahan peraturan dan menyesuaikan perangkat pembelajaran sesuai dengan peraturan. Sejalan dengan George C. Edward III's teori implementasi kebijakan menyatakan bahwa komunikasi adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Karena kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas, konsisten, dan mudah dipahami, serta kesalahan dalam pelaksanaannya akan sangat diminimalkan. Setiap guru di MIS Hasanuddin telah bekerja sama untuk membuat perangkat pembelajaran untuk melaksanakan kurikulum. Perangkat pembelajaran ini terdiri dari modul ajar, tujuan pembelajaran, asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Semua asesmen ini dibuat secara kolaboratif melalui forum KKG untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran yang konsisten.Observasi di kelas menunjukkan bahwa guru mulai menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menggunakan diskusi kelompok, demonstrasi, dan media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan keadaan madrasah. Meskipun demikian, implementasi kebijakan kurikulum telah berjalan dengan baik, tetapi masih memerlukan peningkatan pada aspek pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari

transformasi pendidikan. Keterbatasan fasilitas dan kemampuan guru untuk menggunakan media pembelajaran digital membuat penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya optimal.

MIS Hasanuddin mengembangkan berbagai program penguatan pendidikan karakter, yang merupakan bagian penting dari kebijakan pendidikan nasional selain melaksanakan kurikulum. Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan pembiasaan yang dilakukan setiap hari sebelum proses pembelajaran dimulai membentuk karakter peserta didik. Pembacaan doa bersama, tadarus Al-Qur'an, salat Dhuha berjamaah, pembiasaan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), dan program Jumat Bersih dan Jumat Berbagi adalah beberapa acara yang termasuk dalam rangkaian kegiatan tersebut. Program-program ini tidak hanya bersifat religius; mereka juga menanamkan prinsip disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kerja sama antarsiswa.

Teori George C. Edward III menyatakan bahwa sumber daya merupakan komponen yang sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Efektivitas pelaksanaan kebijakan akan meningkat jika ada sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, anggaran yang cukup, dan informasi yang cukup. Sumber daya manusia di MIS Hasanuddin sangat berkomitmen, tetapi kekurangan fasilitas teknologi dan anggaran masih menghalangi pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pendidikan di MIS Hasanuddin memenuhi empat indikator implementasi kebijakan George C. Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi menunjukkan kategori yang baik karena koordinasi yang efektif, komitmen tinggi dari seluruh pelaksana kebijakan, dan pembagian tugas yang jelas. Sementara itu, sumber daya masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal menyediakan sarana pembelajaran berbasis teknologi, memperkuat dukungan anggaran, dan meningkatkan keterampilan digital guru.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan di MIS Hasanuddin. Kepemimpinan kepala madrasah, budaya organisasi yang baik, profesionalisme guru, dan dukungan orang tua dan masyarakat semua berperan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MIS Hasanuddin, sinergi antarpemangku kepentingan ini sangat penting untuk membangun kebijakan pendidikan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pendidikan di madrasah ini menunjukkan bahwa ia berjalan dengan baik. Namun, diperlukan penguatan pada aspek sumber daya dan evaluasi kebijakan agar program pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan mampu menjawab tantangan perkembangan pendidikan di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pendidikan di MIS Hasanuddin berdasarkan teori analisis kebijakan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan di madrasah tersebut secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Implementasi kebijakan dilakukan melalui berbagai program strategis, seperti penerapan kurikulum sesuai dengan kebijakan pemerintah, penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam, peningkatan kompetensi guru, serta pengelolaan madrasah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III,

keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di MIS Hasanuddin dipengaruhi oleh empat aspek utama. Pertama, aspek komunikasi menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait kebijakan pendidikan telah dilakukan secara efektif melalui rapat koordinasi, supervisi, dan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG), sehingga guru dan tenaga kependidikan memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan kebijakan. Kedua, aspek sumber daya menunjukkan bahwa madrasah memiliki sumber daya manusia yang cukup baik melalui komitmen dan profesionalisme guru, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana prasarana teknologi dan dukungan anggaran yang perlu ditingkatkan.

Meskipun kebijakan pendidikan telah diterapkan dengan baik di MIS Hasanuddin, masih ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Ini terutama terkait dengan peningkatan pemanfaatan teknologi pembelajaran, kesetaraan kompetensi digital guru, ketersediaan fasilitas pendukung, dan penguatan sistem evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan terus-menerus melalui pengembangan kemampuan guru, optimalisasi sarana prasarana, dan

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan di MIS Hasanuddin tidak hanya bergantung pada kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan lembaga untuk mengelola sumber daya, berkomunikasi dengan baik, membangun komitmen bersama, dan melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan yang dikelola secara baik akan mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan madrasah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan membentuk peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki nilai-nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

Alika, C, dkk. 2024. Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, Vol. 9 no. 2

Aziz, A., dkk. 2020. Model Analisis Kebijakan Pendidikan. Jurnal Penelitian Ilmiah Penelitian Ilmiah Vol. 4, No. 2.

Bambang Qomaruzzaman. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam. Bandung: MPM.

Dahyanti, N., et al. (2025). Analisis kebijakan dalam mengatasi problematika pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 2(1), 87-100.

Fathoni, W., dkk. Teori dan Model Analisis Kebijakan Pendidikan. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Volume 03 (01)

H. Muhktar, dkk. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan (Standar Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah/Madrasah). Jambi: Salim Media Indonesia.

Harahap, Nurliani. 2019. Analisis Implementasi Kebijakan dalam Sektor Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Manajemen Pendidikan.* Vol. 12 (1).

Iriantara, Y., dkk. Analisis Kebijakan Pendidikan, Teori, Praktik, dan Implemetasi. Widina Media Utama. Bandung.

Kholifah, E. R., et al. (2024). Model perumusan kebijakan pendidikan. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(2), 1399-1404.

Majid, A. 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan. Samudra Biru. Yogyakarta

Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2021). Model perumusan kebijakan pendidikan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 6(1), 89-94

Rizkwanti, R. A. K. D., & Caspari, A. (2024). Pendekatan studi kritis dan relevansinya terhadap kebijakan publik. The Critical Studies Approach and Its Relevance to Public Policy, 49

Rozal, A. 2021. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Journal of Islamic Educatioan Volume 3 (2)

Sumual, S. D. M., et al. (2024). Teori manajemen pendidikan: Suatu analisis konseptual dan aplikasinya di sekolah. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(1), 353-360.